

# **BAGIAN PERTAMA : MELEPAS LARA**

“Urusan pembaca adalah mengekalkan ingatan pada apa yang mereka sukai. Sebaliknya, urusan penulis adalah menghapus ingatan dari apa-apa yang sudah ia bikin. Ia hanya memusatkan perhatian pada bagaimana melahirkan karya sebaik-baiknya saat ini.”

– AS Laksana



# Siap, Sesuai Prosedur, Ndan...!

27 November 2010

Membaca *Jawa Pos* hari Selasa kemarin membuat hati miris. Di Kalimantan dua orang kakek-kakek ditangkap polisi dengan tuduhan merusak tanaman. Salah seorang kakek waktu akan ditangkap itu sedang ingin buang hajat. Permintaannya kepada polisi untuk buang hajat ditolak. Ia pun digelandang ke rumah seorang kakek lain yang juga disangka melakukan tindakan kriminal. Setelah memaksa akhirnya ia diizinkan untuk buang hajat, itu pun dengan todongan pistol dan pintu toilet dalam keadaan terbuka. Di kantor polisi ia dipaksa mengakui merusak tanaman. Setiap pertanyaan dalam BAP harus dijawab ya. Padahal, tanaman yang disangkakan dirusak olehnya itu memang miliknya sendiri. Setelah ditahan beberapa bulan mereka pun dilepas. *Na'udzubillah*. Hebat nian pengayom masyarakat kita itu.

Di koran *Kompas* bulan ini juga saya membaca berita seseorang yang ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan

tindakan pidana yang tak pernah ia lakukan. Ia pun menolak tuduhan polisi sehingga harus menerima pukulan dari aparat. Hingga akhirnya suatu hari dibawalah ia ke suatu tempat kemudian kakinya ditembak oleh polisi. Hebat nian pelindung masyarakat kita itu. Syukurlah akhirnya dalam persidangan hakim membebaskannya karena tidak terbukti bersalah.

April 2010, saya membaca juga di koran *Kompas* kelakuan polisi yang menghajar orang-orang yang disangka melakukan kejahatan, padahal belum tentu mereka bersalah. Kejadiannya di Tobasa, Sumatra Utara. Empat orang ditangkap dengan tuduhan perampokan, tetapi dua orang kemudian dilepaskan setelah ditahan beberapa bulan. Dua orang yang lain berlanjut hingga vonis bersalah di pengadilan. Saat di tahanan itu, mereka disiksa untuk mengakui perbuatannya. Salah seorang di antara mereka gendang telinganya sampai pecah. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah setelah vonis ternyata ada orang lain yang mengaku menjadi pelaku perampokan yang disangkakan kepada mereka. Hebat nian pelayan masyarakat kita itu.

Masih ingat Ryan si jagal asal Jombang? Kasusnya ternyata membuka kasus lain. Sebelum kasus Ryan terbungkar, di Jombang ada kejadian pembunuhan terhadap Asrori. Polisi pun menangkap tersangka atas nama Hambali dan Devid, meskipun berkali-kali menolak disangka membunuh mereka tetap ditahan. Di tahanan pun mereka mengalami penyiksaan berkali-kali oleh aparat. Hingga maju di persidangan mereka divonis 17 dan 12 tahun penjara. Akhirnya, muncullah kasus Ryan sekaligus mematahkan

tuduhan polisi di Jombang itu. Terbukti akhirnya bahwa pembunuh Asrori adalah Ryan.

Sungguh disayangkan kerja polisi yang masih diwarnai dengan kekerasan, penyiksaan, dan manipulasi BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Mungkin masih ada kejadian salah tangkap dan pemaksaan polisi kepada orang yang tidak bersalah, hanya saja belum terungkap di media.

Terus, bagaimana dengan para korban? Akankah polisi dengan jantan mengakui kesalahannya? Atau, hanya sekedar minta maaf kemudian dilepas begitu saja dengan meninggalkan trauma yang mendalam? Belum lagi nama baik dia yang tercemar. Apalagi jika ia tulang punggung keluarga. Meninggalkan keluarga berbulan-bulan tanpa ada yang menafkahi. Beranikah polisi memberi ganti rugi kepada mereka.

Saya pernah membaca di koran, ketika wartawan menanyakan kepada atasan polisi tentang penyiksaan di tahanan, biasanya mereka membantah. Mereka selalu menyatakan bahwa polisi sudah bekerja sesuai prosedur. Jangan-jangan penyiksaan itu sendiri memang bagian dari prosedur polisi. Memukul, menyetrum, menendang, adalah bagian dari interogasi.

“Siap, prosedur sudah dijalankan, Ndan...!” jawab mereka tegas.

Saya yakin masih banyak polisi yang baik, tetapi karena ulah segelintir polisi yang berkelakuan tidak baik, nama mereka pun jadi ikut jelek.

# Wartawan Bodrex

6 Desember 2010

Dewan Pers pada 1 Desember 2010 menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh tiga wartawan dari tiga media massa. Mereka dinilai bersalah karena terbukti meminta hak istimewa untuk membeli saham perdana PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Permintaan mereka itu menimbulkan konflik kepentingan sebab mereka bertugas sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah dinyatakan bersalah, ujungnya mereka dipecat oleh pihak media masing-masing.

Pasal 6 Kode Etik Wartawan (KEW) menyebutkan bahwa Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sedangkan, suap adalah segala pemberian dalam bentuk

uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi. Kalau menerima uang saja dilarang apalagi kalau meminta-minta uang maupun fasilitas.

Saya punya pengalaman tidak enak dengan wartawan, entah itu wartawan betulan atau wartawan gadungan. Kejadiannya di sebuah hotel terbaik di daerah saya awal tahun ini. Seusai acara penutupan sebuah pelatihan yang diselenggarakan kantor saya oleh bupati, saya didekati seseorang. Dengan berbisik-bisik, takut jika kedengaran orang lain, dia bertanya, “Ada *sangu* untuk *temen-temen* wartawan tidak?”

Saya menatap heran, saya suruh ulang perkataannya barangkali pendengaran saya salah. Namun, ternyata tidak. Benar, dia memang minta *sangu* (uang saku). Saya benar-benar kaget. Saya memang pernah mendengar ada wartawan yang suka meminta-minta, istilahnya wartawan *bodrex*, tetapi kalau ketemu langsung, ya baru kali ini.

Wartawan merupakan salah satu profesi mulia. Dengan keberadaannya, masyarakat bisa memperoleh beragam informasi dan berita. Namun, kadang-kadang kemuliaannya dikotori oleh segelintir tangan kotor oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa hal ini bisa terjadi?

*Pertama*, profesi wartawan hanya dijadikan kedok. Profesi sejatinya tidaklah itu. Ia tidak lain hanyalah seorang peminta-minta atau bahkan pemeras. Dengan sedikit gertak, sumber beritanya akan ketakutan dan segera memberikan upeti. Cerita seperti ini jarang muncul di media massa, tetapi saya yakin ada. Hanya saja mereka yang menjadi korban enggan untuk bercerita atau melapor, bisa jadi karena merasa

ribet urusannya berubah panjang atau memang benar ia pernah melakukan kesalahan.

*Kedua*, ketiadaan kontrol dari media massa tempat wartawan itu bekerja. Atau, bisa jadi memang media massa itu juga merupakan kedok seperti halnya profesi wartawan. Medianya ecek-ecek, wartawannya *bodrex*. Sekali lagi saya hanya menduga ini hanyalah perbuatan oknum. Masih banyak media yang tidak seperti itu.

*Ketiga*, gaji wartawan yang kecil. Wartawan juga manusia biasa yang perlu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Karena penghasilan dari medianya dianggap tidak besar maka ia harus mencari cara untuk mendapatkan penghasilan lain. Salah satunya ya dengan menodong itu.

Kembali ke cerita saya di awal. Akhirnya saya tidak memberi apa-apa kepada wartawan itu. Saya juga tidak tahu benar apakah ia memang wartawan sungguhan karena saya lupa menanyakannya. Saya juga lupa tidak memeriksa sekitar tubuhnya, siapa tahu ada tulisan wartawan atau keplek bertuliskan “pers”. Namun, beberapa hari kemudian saya bertemu lagi dengannya di kantor. Ia bertamu pada kepala kantor saya. Wah, jangan-jangan mau ambil jatah.

# Pungutan Pun Ada di Aparat

16 Desember 2010

**P**ersidangan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Doadji kembali membawa berita menarik. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh mantan Kepala Polres (Kapolres) di wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk memberikan kesaksian. Ketujuh saksi tersebut, yakni mantan Kapolres Kuningan, Sukabumi, Banjar, Indramayu, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Bogor mengakui bahwa Polda Jabar yang dipimpin Susno memotong anggaran pengamanan Pemiluakada Jabar tahun 2008. Berita ini saya baca di Harian *Jawa Pos*.

Di depan majelis hakim, ketujuh mantan kapolres tersebut ramai-ramai menyebutkan bahwa dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 memang “disunat” dengan kisaran yang berbeda-beda di setiap wilayah, yakni antara Rp60 juta hingga Rp640 juta. Mereka para pejabat teras kepolisian itu mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan prosedur. Pembuatan laporan keuangan yang tidak

sesuai kenyataannya merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Modus pemotongan anggaran memang sudah menjadi hal yang lumrah di lingkungan birokrasi. Besarannya variatif, ada yang 1%, ada yang 10%, ada pula yang 20% dari anggaran yang dicairkan, bergantung dari kebijakan pemegang kekuasaan. Namanya pun macam-macam, ada dana non budgeter, dana taktis, dana operasional, rekonstruksi, dan lain-lain. Namun, sebenarnya hal itu tidak dapat dibenarkan. Beberapa alasan biasanya digunakan sebagai pembenar, yakni untuk menutupi biaya operasional kantor yang tidak ter-*cover* dalam anggaran, setoran ke pejabat tertentu, setoran ke penegak hukum untuk menutupi perkara pidana, biaya kampanye pemilu, biaya pengurusan ini-itu, bantuan sosial, dan lain-lain. Namun, itu semua baru berupa asumsi.

Dalam situs <http://nusantaranews.wordpress.com> disebutkan bahwa dana non budgeter adalah anggaran *ad hoc* yang dikumpulkan dan/atau digunakan oleh pemerintah/negara untuk keperluan keadaan mendesak (*force majeure*) karena APBN tidak dapat memenuhi kebutuhan departemen. Anggaran ini tidak masuk dalam rancangan APBN yang diajukan pemerintah ke DPR. Kasus yang umum terjadi pada masa lalu dari anggaran *non budgeter* adalah dana yang digunakan untuk bencana alam, bencana sosial, ataupun bencana ekonomi (krisis ekonomi), serta program-program departemen yang sangat mendesak. Kondisi ini “memaksa” menteri untuk memutuskan kebijakan mengumpulkan dana salah satunya dengan menerbitkan rekening pribadi atas